

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian dalam administrasi publik. Dalam melaksanakan kebijakan publik terdapat peran pemerintah sebagai administrator publik yang menjalankan kebijakan publik untuk tujuan pemecahan masalah masyarakat atau dapat dikenal dengan masalah publik.

Perubahan Pemerintahan Sentralistik menjadi Pemerintahan Desentralistik dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri seperti membuat kebijakan untuk dijalankan oleh daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah merupakan hal yang tepat untuk Indonesia dikarenakan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan proses berjalannya pemerintahan daerah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah direvisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah yang bijak untuk terus memperbaiki mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembangunan daerah merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

sesuai yang telah tertuang dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945).

Berdasarkan penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah angka 10 tentang Pembangunan Daerah disebutkan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi antara lain :

1. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
2. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
3. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Sebagai bentuk dalam rangka peningkatan pembangunan daerah ini, salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah tersediannya keuangan yang memadai baik dari subsidi pusat maupun daerah yang didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri seperti retribusi daerah, pajak

daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya.

Sumber keuangan untuk melakukan Pembangunan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kontribusi yang besar untuk keberhasilan pembangunan daerah. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah. Sumber penerimaan (PAD) yang dimaksud berdasarkan penjelasan Umum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah angka 5 tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain :

1. PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;

- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi yang cukup besar di Kota Semarang adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat daerah. Data Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2015 ditunjukkan melalui tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Pendapat Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2015

No	Uraian	Realisasi 2014	Anggaran 2015	Realisasi 2015	Selisih	Persentase
1	Pendapatan Pajak Daerah	791.509.586 .089	783.000.000 .000	816.208.853 .784	33.208.853 .784	104,24 %
2	Pendapatan Retribusi Daerah	110.491.080. 293	103.340.009 .000	88.329.210 .805	(15.010.078 .195)	85,47 %
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.036.099 .560	9.306.898 .000	10.530.576 .700	1.223.678 .700	113,15 %
4	Lain-lain PAD yang sah	228.330.462 .551	211.406.350 .000	286.513.137 .170	75.106.787 .170	135,53 %
	Jumlah PAD	1.138.367. 228.493	1.107.053 .257.000	1.201.581. 778.459	94.528.521. 459	108,54 %

Sumber : LKPJ, Walikota Semarang, Tahun 2015

Pada tabel sebelumnya dapat dilihat kontribusi yang diberikan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2015 mencapai 7,3 % dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah yang diterima keseluruhan.

Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di Kota Semarang adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya untuk melaksanakan pemungutan pajak dan tertib administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Menurut Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan studi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Salah satu contoh Retribusi Daerah yang dimaksud yaitu Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa. Jadi Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang didapat dari pengguna jasa pengguna lahan pasar untuk kegiatan jual beli yang timbal baliknya digunakan untuk penyediaan pelayanan jasa umum dan penyediaan fasilitas pasar serta pembangunan kota. Saat ini, perkembangan pasar sangat pesat hampir di setiap daerah.

Masing-masing daerah berlomba untuk menjadikan kawasan pasar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi.

Berikut data Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2015 ditunjukkan melalui tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Pendapatan Retribusi Jasa Umum Kota Semarang Tahun 2015

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	Realisasai 2014	Anggaran 2015	Realiasasi 2015	Selisih	Persent -ase
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Ke bersihan	13.610.750. 000	10.197.310.000	14.059.141. 286	3.861.831.286	137,87
2.	Retribusi Pelayanan Pasar	13.824.452. 709	9.887.971.000	8.643.591. 665	(1.244.279. 335)	87,42
3.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	6.468.913. 470	6.244.051.000	6.119.204. 000	(124.847.000)	98,00
4.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.283.231. 500	3.376.469.000	3.564.854. 400	188.385.400	105.58
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.789.089. 500	3.700.000.000	2.804.290. 000	(895.710.000)	75,79

Sumber : LPJ Walikota Kota Semarang 2015

Pada tabel sebelumnya, dapat dilihat Retribusi Pelayanan Pasar berada di urutan ke-2 terbesar Pendapatan Retribusi Jasa Umum. Dalam melakukan pungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh pegawai Dinas Pasar Kota Semarang yang mempunyai wewenang dalam melakukan pungutan yang diwajibkan atas penggunaan pelayanan fasilitas di lingkungan pasar kepada pedagang atau wajib retribusi yang menggunakan jasa pelayanan di lingkungan pasar tersebut. Perlu diingat dalam Pasca penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Pemkot Semarang, beberapa dinas bergabung dengan dinas lain menggunakan nama baru atau berdiri sendiri dengan nama dinas terpisah. Tak terkecuali Dinas Pasar yang melebur menjadi Dinas Perdagangan sehingga ada sedikit perubahan dalam organisasi seperti penambahan bidang UPTD Metrologi legal yang berfungsi memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya namun dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar tetap mengacu pada Perda No 2 Tahun 2012.

Kota Semarang yang memiliki 53 Pasar dan 6 UPTD Pasar menurut Badan Pusat Statistik tentang Banyaknya Pasar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pasar di Jawa Tengah Tahun 2013, menjadikan retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu pendapatan yang cukup besar kontribusinya yang mampu membantu pembangunan daerah Kota Semarang. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pasar guna pembangunan daerah tergantung pada pemungutan retribusi yang ditentukan

pemerintah daerah dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kegiatan pasar. Upaya pemerintah daerah yaitu Dinas Perdagangan dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan retribusi dan tertib administrasi di lingkungan pasar, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi, dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di lingkungan pasar yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi. Dengan cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar. Pentingnya suatu pelaksanaan kebijakan tergantung bagaimana pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana atau tidak, dalam hal ini Retribusi Pelayanan Pasar Kota Semarang mengalami ketidak konsistenan dalam penerimaan realisasi pendapatannya.

Berikut pencapaian pendapatan retribusi tahun 2014-2016 yang dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	13.757.871.000	13.824.452.709	100,48
2015	9.887.871.000	10.406.380.343	105,24
2016	11.273.817.000	11.287.660.279	100.12

Sumber : Dokumen Dinas Perdagangan Kota Semarang

Realisasi penerimaan pendapatan Dinas Perdagangan dapat dibilang tidak konsisten. Tahun 2014 realisasi penerimaan mencapai Rp 13.824.452.709 dari target yang ditentukan sebesar Rp 13.757.871.000. Pada tahun 2015 tercatat mengalami penurunan penerimaan menjadi sebesar Rp 10.406.380.343 melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 9.887.871.000. Selanjutnya pada tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi pasar mengalami kenaikan dengan pendapatan sebesar RP 11.287.660.279 dari target yang ditentukan yaitu Rp 11.273.817.000.

Petugas Dinas perdagangan Seksi Pendapatan dari Bidang Bina Usaha yaitu Bu Wahyu Wijarsih, SE menjelaskan tidak konsistennya penerimaan retribusi pelayanan pasar dikarenakan masih banyaknya pedagang yang tidak membayar atau terlambat membayar retribusi, hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pelayanan pasar akan berdampak pada pengelolaan, penataan, dan pembaharuan pasar. Karena apabila pedagang terlambat atau menunggak dalam kewajibannya sebagai wajib retribusi untuk membayar tidak tepat pada waktunya, akan menghambat dalam rencana pengelolaan dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu maka akan mendukung dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar juga untuk memajukan pasar. Penurunan pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan pasar Kota Semarang bisa menjadi dampak buruk dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terutama dalam pembangunan daerah yang akan terhambat.

Selain itu tidak konsistennya pendapatan diperkuat dengan adanya penyegelan 1008 kios dan los di pasar-pasar akibat penunggakan pembayaran retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang.

Berikut pernyataan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto usai mengikuti Rapat Paripurna di Balaikota Semarang :

“Hingga saat ini saja sudah ada pemasukan PAD retribusi mencapai Rp. 80 juta. Saya beri waktu sampai puasa tahun ini harus (pedagang) sudah terbayar. Kalau tidak, maka akan saya serahkan ke pedagang yang membutuhkan,” ujar Fajar.

Menurut Fajar, akhir Mei 2017 kios pedagang yang tidak mau membayar retribusi akan segera dicabut izinnya.

“Nanti setelah lebaran baru kami proses dan serahkan ke pedagang lain yang membutuhkan. Saya kasih waktu sekitar 1,5 bulan untuk segera mengurus. Kalau ndak diurus ya berarti mutlak jadi milik Dinas Perdagangan,” katanya.

Fajar menjelaskan, banyak pedagang yang menunggak retribusi, tercatat 1008 pedagang dari seluruh pasar tradisional di kota Semarang menunggak retribusi dan akhirnya kios maupun los dagangannya disegel. Bahkan, ada pula pedagang yang menunggak hingga 3 sampai 4 tahun.

“Kalau mau menempati kiosnya lagi ya harus bayar dulu retribusinya. Itu kalau mereka mau bayar retribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang mungkin bisa mencapai Rp. 300juta yang masuk ke kas daerah. Dan salah satu kendala PAD kita kurang adalah pedagang memang banyak yang menunggak retribusi. Pokoknya, Dinas Perdagangan gak main-main

terkait penghasilan, bahkan kami sudah izin dengan bapak Walikota,”
imbuhnya.

Sumber:

(<http://aps18.com/2017/04/25/tunggakan-retribusi-pasar-masuk-pad-mencapai-rp-80juta/> diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 01.01 WIB)

Dalam penelitian ini , penulis akan memilih pasar yang dianggap mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Menurut Seksi Pendapatan dari Bidang Bina Usaha yaitu Bu Wahyu Wijiarsih, SE mengatakan Pasar Djohar merupakan pasar yang mempunyai pendapatan tertinggi sebelum terjadi kebakaran namun untuk saat ini pendapatan tertinggi didapat dari Pasar Karangayu. Saat ini Pasar Karangayu merupakan pasar yang cukup ramai dikunjungi masyarakat untuk aktifitas ekonomi. Penurunan pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan pasar Kota Semarang bisa menjadi dampak buruk dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terutama dalam pembangunan daerah yang akan terhambat.

Penulis tertarik untuk mengangkat tema Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar karena melihat dari pendapatan yang didapat dari retribusi pelayanan pasar yang merupakan retribusi yang cukup besar dalam rangka peningkatan PAD. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada beberapa tahun terakhir ini terjadi tidak konsistennya penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah. Hal ini kemungkinan dikarenakan rendahnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pelayanan pasar akan berdampak pada pengelolaan, penataan, dan pembaharuan pasar.

Berdasarkan uraian yang disajikan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 studi tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan Perda No.2 tahun 2012 studi tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kota Semarang dengan rinci sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan Perda No.2 Tahun 2012 dengan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan Perda No 2 Tahun 2012 dengan Studi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan atau referensi mengenai pengembangan ilmu implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Menjadi salah satu masukan bagi Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga dalam menjalankan pungutan retribusi daerah.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk dapat lebih menambah pengetahuan dan memahami mengenai implementasi kebijakan Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2012 tentang Pelayanan Jasa Umum Studi Retribusi Pelayanan Pasar memberikan deskripsi tentang pungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dibuat untuk menghindari adanya duplikasi kesamaan atau yang biasa disebut plagiasi dengan cara pemetaan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat dilihat perbedaan penelitian penulis dengan jurnal- jurnal yang dijadikan sumber dalam hal masalah yang diangkat, tujuan penelitian, teori utama atau model yang digunakan, tipe atau jenis penelitian, teknik analisis, dan

sebagainya.

Perbedaan ini dapat kita bandingkan dari lima jurnal yang telah dipilih penulis dalam bentuk matriks yang digambarkan dalam bentuk kolom-kolom yang nantinya di bagian akhir disimpulkan secara umum perbedaan yang ada dari ke lima matriks tersebut terletak di bagian mana serta kekurangan dan kelebihan apa yang dimiliki masing masing jurnal sehingga dapat dijadikan gambaran supaya penelitian penulis harus lebih baru dari artikel jurnal yang sudah ada. Karena syarat dari diadakannya penelitian adalah memiliki sifat kebaruaran. Berikut matriks perbedaanya :

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pengarang, Judul Artikel, Edisi Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai	Hasil/Temuan-an	Karakteristik Penelitian Peneliti	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1.	Judul: Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Semarang Penulis : Ardana Indra Permana Jenis : Skripsi Tahun : 2013	Tujuan Penelitian : Menganalisis pengaruh PDRB perkapita, pertumbuhan penduduk dan laju inflasi terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2002-2010	Teori: Ilmu Keuangan Negara Retribusi PDRB Perkapita Inflasi Kependudukan	Hasil Temuan : PDRB Perkapita, pertumbuhan penduduk, serta laju inflasi menunjukkan hasil positif terhadap pengaruh peningkatan retribusi pasar	Teknik Analisis : metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif statistik serta regresi linier berganda	Persamaan: Persamaan terletak pada lokus penelitian peneliti yaitu retribusi pasar di Kota Semarang Perbedaan: Perbedaan terletak pada fokus masalah yang ada serta

						penggunaan teknik analisis
2.	<p>Judul: Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Rejowinangun Kota Magelang</p> <p>Penulis : Aditya Kurniawan Husen Kusuma</p> <p>Jenis : Skripsi</p> <p>Tahun : 2016</p>	<p>Tujuan Penelitian : Mengetahui bagaimana berjalannya kebijakan retribusi pasar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya</p>	<p>Teori : Perpaduan model Implementasi kebijakan Edward III dengan Van Meter dan Van Holt</p>	<p>Hasil Temuan : Komunikasi yang dilakukan pegawai sudah baik namun dalam kuantitas pegawai dinilai masih kurang</p>	<p>Teknik Analisis : Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Persamaan: Memiliki fokus yang sama yaitu retribusi untuk meningkatkan PAD</p> <p>Perbedaan: Perbedaan terletak pada jumlah penggunaan teori faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan</p>
3.	<p>Judul: Analisis Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Batang Tahun 1998-2002</p> <p>Penulis: Bambang Tri Atmojo</p> <p>Jenis : Skripsi</p> <p>Tahun:</p>	<p>Tujuan penelitian : Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel jumlah pedagang, jumlah kios dan jumlah los pasar terhadap penerimaan retribusi pasar</p>	<p>Teori: Menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji t</p>	<p>Hasil Temuan : Terdapat pengaruh positif jumlah pedagang, jumlah kios, dan jumlah los terhadap penerimaan retribusi pasar.</p>	<p>Teknik Analisis : Penelitian Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Persamaan : Fokus penelitian sama yaitu menjelaskan faktor-faktor penentu penerimaan retribusi pasar</p> <p>Perbedaan : Perbedaan terletak pada judul , masalah yang</p>

	2004					diungkapkan , tujuan penelitian atau teori dan model yang digunakan untuk penelitian
4.	<p>Judul : Impelementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Semarang</p> <p>Penulis : Sindy Fitria Utami</p> <p>Jenis : Skripsi</p> <p>Tahun : 2015</p>	<p>Tujuan Penelitian : Mengetahui dampak penerimaan retribusi parkir dan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah diimplementasikan Peraturan Daerah di Kota Semarang</p>	<p>Teori : Teori prinsip implementasi kebijakan publik</p>	<p>Hasil Temuan : Dari kajian kualitatif tidak ada perbedaan penerimaan pendapatan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan</p>	<p>Teknik Analisis : Penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini mengacu kepada Perda dan Fokus dari penelitiannya yaitu retribusi Teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan</p> <p>Perbedaan : Perbedaan terletak pada fokusnya yaitu retribusi parkir dengan retribusi pelayanan pasar yang sedang penliti teliti</p>

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Definisi Administrasi Publik

Banyak para ahli yang memberikan definisi yang mempunyai versi yang berbeda pada Administrasi publik dalam (*Syafie 2006 : 23-25*) di antaranya sebagai berikut :

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro mendefinisikan administrasi publik sebagai (1) suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan (2) meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka, (3) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) sangat erat berkaitan dengan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (5) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian administrasi perseorangan.

Sementara itu John M. Pfifner dan Robert V. Presthus mendefinisikan administrasi publik yaitu : (1) administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik (2) Administasi publik merupakan suatu kordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah (3) Administrasi publik suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arahan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Lain halnya George J.Gordon mendefinisikan administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan.

Menurut Dwight Waldo administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Dari beberapa konsep atau definisi administrasi publik yang berbeda versi itu sendiri dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan proses bagaimana pemerintah mempunyai tugas untuk memenuhi tujuan yaitu memecahkan masalah publik dengan bekerjasama dengan sekelompok atau lembaga-lembaga yang mengemban tugas pemerintahan. Namun demikian ada tujuh hal khusus dari administrasi publik yaitu : (1) tidak dapat dihindari (*unavoidable*), (2) senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*), (3) mempunyai prioritas (*has priority*), (4) mempunyai pengecualian (*has exception*), (5) puncak pimpinan politik (*top management*), (6) sulit diukur (*difficult to measure*) , sehingga kita terlalu banyak mengharap dari administrasi publik ini (*more is expected of public administration*).

Seperti yang kita ketahui definisi menurut beberapa para pakar ahli menunjukkan bahwa administrasi publik yaitu suatu proses kerjasama antar pemerintah yang telah diorganisir untuk mencapai tujuan pemerintah, untuk mencapai tujuan pemerintah itu sendiri membutuhkan suatu aturan yang dapat mengikat masyarakat demi tercapainya kepentingan bersama yaitu dengan dibuatnya kebijakan publik.

Kebijakan publik terkait dengan administrasi publik, kebijakan publik merupakan alat berupa serangkaian kesimpulan atau rekomendasi yang dihasilkan dari proses administrasi publik untuk memenuhi tujuan pemerintah.

1.6.2 Konsep Kebijakan Publik

Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para pakar mengenai konsep kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Keban (2004:55) Kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis Kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (2008 :1) Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever goverments choose to do or not to do*). Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah".

Dengan demikian kebijakan menurut Dye, adalah merupakan upaya untuk memahami :

1. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
2. Apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan
3. Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (dikutip Dye,1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan kebijakan publik dari para ahli yang telah dikemukakan kebijakan publik merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat aturan untuk masyarakat agar mematuhiya demi kepentingan bersama yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

1.6.3 Tahap-tahap Kebijakan

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Ripley sebagaimana dikutip (Subarsono:11-12) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni ; (1) membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

2. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan

Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negoisasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3. Tahap implementasi kebijakan

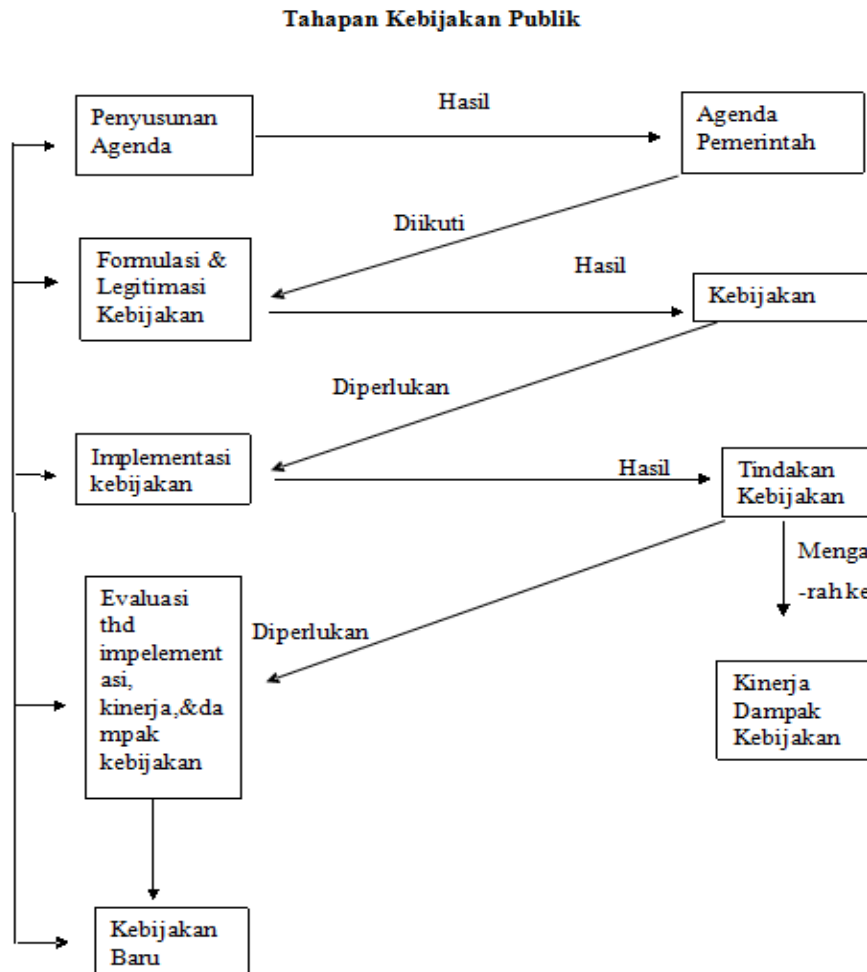
Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

4. Tahap Evaluasi terhadap implementasi, kinerja & dampak kebijakan

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Berikut merupakan gambaran tahap-tahap proses kebijakan publik:

Gambar 1.1



Sumber : Ripley, 1985 : 49

(dalam buku Subarsono 11:12)

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak diimplementasikan.

1.6.4 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri, Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah dalam dikutip dari buku Tachjan (2006:9) dalam buku Arifin (2014:52) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni ;

Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan ,

Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public (official officers) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan.

Disisi lain, Tachjan (2006:63) dalam buku Arifin (2014:52) mengemukakan bahwa: "Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu

aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebab Pandangan tersebut, mengarahkan kita bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administratif secara berimbang. Hal ini sebagai pertimbangan mendasar yang prinsip dan substansial bahwa setiap kebijakan sejak dirumuskan, diimplementasikan, sampai tahapan evaluasi pasti bersinggungan dengan perbedaan kepentingan dalam tataran politik, akan tetapi harus pula membuat kita semakin proaktif dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan berdasarkan system, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public sebagai wujud kehandalan dalam prospektif administrative kebijakan itu sendiri.

Dunn (1981:56) dalam buku Arifin (2014:53), memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut: *Policy implemetation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentilly theoretical*, Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia terkait dengan tujuan diadakannya kebijakan (*policy goals*) Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta izin

pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Dengan demikian, konteks implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, Ini menunjukkan bahwa proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya . Rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak diimplementasikan. Oleh sebab itu, tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Sementara itu, Josy Adiwisatra dalam prolognya pada buku TachJan (2006:12) dalam buku Arifin (2014:54) menegaskan, bahwa: "Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat banya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan". Selanjutnya, masih menurut Josy Adiwisatra dalam prolognya pada buku Tachjan (2006;xiv) bahwa: "Keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan."

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat

yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk lebih mengimplentasikan kebijakan publik Nugroho (2003 : 158) dalam buku Arifin (2014:54) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan. Dari dua pillhan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realitas, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Kemudian timbul pertanyaan mengenai “apa prinsip-prinsip pokok dalam implementasi kebijakan yang efektif ?” Pada dasarnya menurut Riant Nugroho (2014 : 686-688) ada lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how exellent is the policy*. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan

sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

“Tepat” yang kedua adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat / swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

“Tepat” ketiga adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi telah sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Di Indonesia kebijakan untuk *income generating* diwarnai dengan banyaknya kebijakan pemberian kredit bersubsidi oleh berbagai

departemen yang akhirnya saling *overlapping* dan *saling mematikan* di lapangan.

Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak.

Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam kondisi konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Pembangunan kawasan industri maju di kawasan terbelakang tanpa menyiapkan masyarakatnya menghasilkan penolakan yang laten seperti kasus-kasus di Papua. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat *baru* atau *memperbarui* implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

“Tepat” keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista

variabel eksogen, yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

“Tepat” kelima adalah “tepat proses”. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu:

1. Penerimaan Kebijakan. disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah *memahami* kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
2. Adopsi Kebijakan Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah *menerima* kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
3. Kesiapan Strategis. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan. Seperti yang anda ketahui tanggung jawabnya untuk menjalankan kebijakan.

Dari pandangan para ahli mengenai implementasi kebijakan dapat disimpulkan, menurut peneliti, implementasi kebijakan publik adalah cara dan langkah aktor-aktor atau lebih utamanya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan ketepatan bagaimana kebijakannya, ketepatan siapa pelaksana kebijakannya, ketepatan targetnya, ketepatan lingkungannya, serta ketepatan proses kebijakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan tersebut.

1.6.5 Model Implementasi Kebijakan

Berikut merupakan beberapa model pendekatan Implementasi Kebijakan Publik menurut para ahli, yaitu :

1. Implementasi Kebijakan Publik Model Edward III

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga

mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran maka kemungkinan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Secara umum Edward dalam Budi Winarno (2012,176) membahas tiga hal penting di dalam komunikasi kebijakan yaitu :

1. Transmisi : pejabat telah menyadari bahwa telah ada perintah yang dibuat dan perintah untuk pelaksanaannya telah ditetapkan sebelum akhirnya pejabat tersebut mengimplementasikan kebijakan/ program. Seringkali pejabat pelaksana mengabaikan dan salah memahami terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi menurut Budi Winarno (2012,179)

Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. *Kedua*, informasi melewati berlapis-lapis birokrasi kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang ditentukan menjadi salah satu kemungkinan distorsi perintah pelaksanaan, sehingga program harus disosialisasikan dengan baik agar tidak terjadi distorsi dari tujuan dan sasaran kebijakan. *Ketiga*, penangkapan komunikasi yang dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmampuan para pelaksana mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

2. Kejelasan : petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang sudah diterima oleh pejabat pelaksana tidak hanya sekedar diterima saja tetapi juga harus dikomunikasikan secara jelas tentang kapan dan bagaimana program dilaksanakan.

3. Konsistensi : merujuk pada perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana jelas dan konsisten. Jelas dan konsisten disini mengandung arti bahwa perintah-perintah yang diberikan tidak boleh ada pertentangan yang pada akhirnya membuat para pelaksana kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

2.Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya yang dimaksud dapat berwujud sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan dalam model Edward III dalam Budi Winarno (2012,184) di kemukakan ada empat aspek antara lain :

1. Staff : Staff merupakan sumber daya yang paling penting, yang dilihat tidak hanya dalam segi kuantitas atau jumlah saja akan tetapi juga kualitas atau kecakapan yang dimiliki pelaksana.

2. Informasi : Informasi di sini terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan. Dimana pelaksana dituntut harus mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya atau dengan kata lain pemahaman atas tugas yang harus dikerjakan terkait implementasi kebijakan. Selain itu juga terkait dengan pelaksana memiliki informasi tentang orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan apakah sudah menaati undang-undang ataukah tidak.

3. Wewenang : Wewenang di sini terkait dengan penggunaan wewenang secara efektif, karena tidak sedikit pelaksana kebijakan memiliki wewenang formal yang besar tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Menurut Edward III ada perbedaan substansi atas ketersediaan wewenang formal dengan penggunaan wewenang secara efektif. Pada banyak hal wewenang formal sudah ada tetapi tidak digunakan sebagaimana semestinya. Edward III menekankan wewenang tersebut pada pemberian sanksi, ditambahkan oleh Lindbloom wewenang dapat berupa persuasi, ancaman dan tawaran keuntungan.

4. Fasilitas : Pertanyaan yang diajukan oleh Edward III adalah bagaimana para pelaksana mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam penyediaan fasilitas tersebut.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan berjalan tidak efektif.

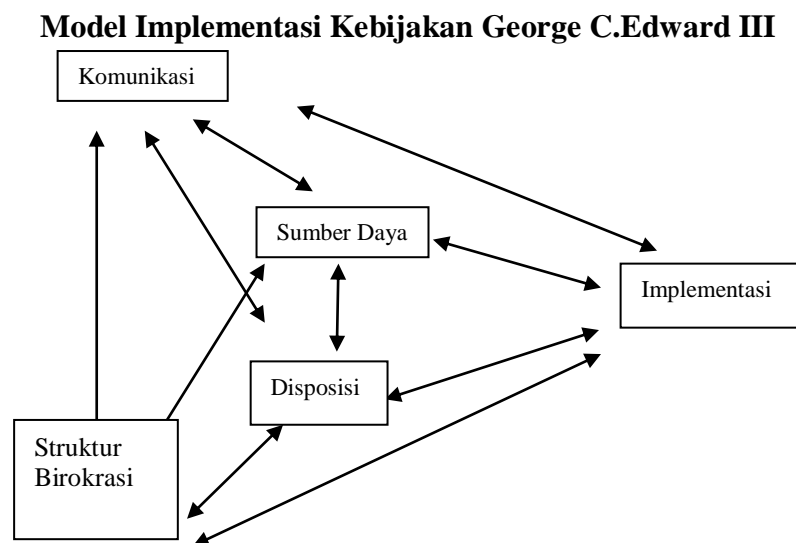
4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana

program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Berikut gambar model implementasi kebijakan menurut Edward III :

Gambar 1.2



Sumber : Edwards III dalam (Dwiyanto Indiahono, 2009:33)

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

Model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Carel Van Horn "merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan."

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012, 156-170) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni : 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber-sumber kebijakan 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 6) Sikap para pelaksana. Berikut penjelasan enam variable menurut Van Meter dan Van Horn :

1. Standar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut kedua tokoh ini, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauhmana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna untuk menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Proses studi implementasi itu sendiri, tujuan-tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Implementasi kebijakan, dalam prakteknya kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan sehingga dengan demikian dalam beberapa kasus besar kecilnya dan akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Implementasi akan berjalan efektif jika standar dan sasaran dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Hal ini sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana disini mencakup struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri

dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Hal ini juga perhatian perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

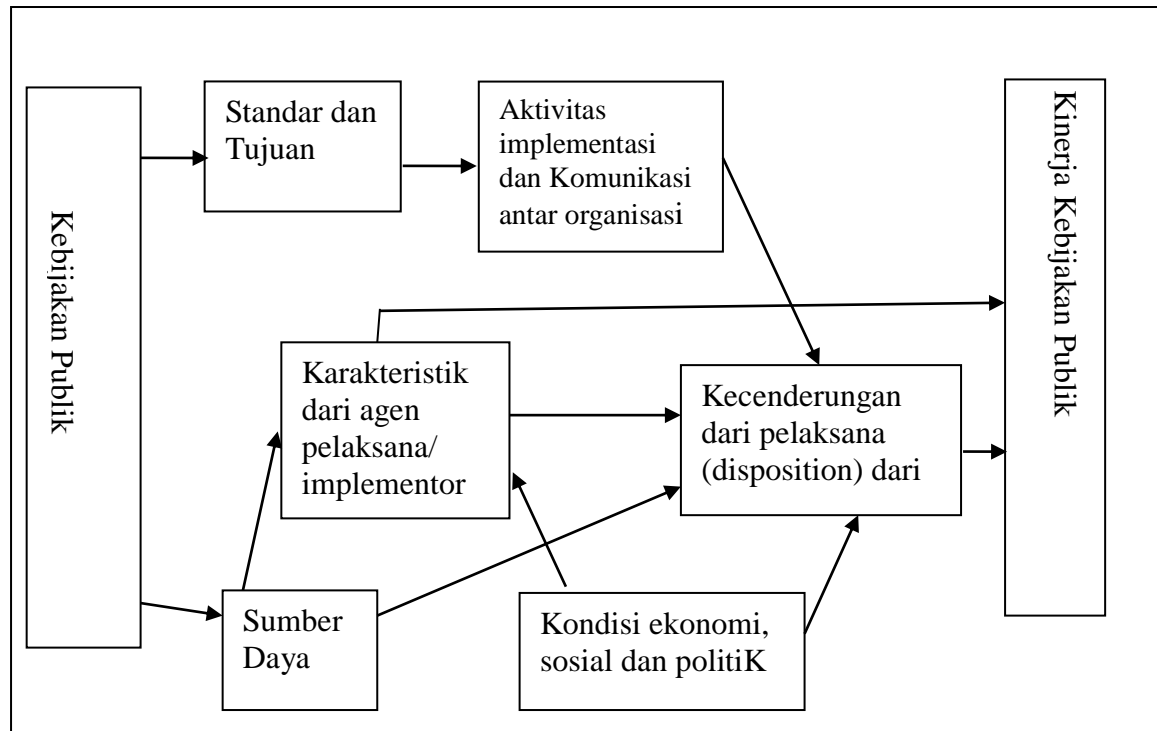
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi.

6. Sikap para pelaksana

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan itu dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Gambar 1.3

Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Carel Van Horn



Sumber : Van Meter dan Horn,1975 : 463

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.

Model yang di kemukakan oleh Charles O. Jones dalam buku Arifin (2014 :81), Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jone ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

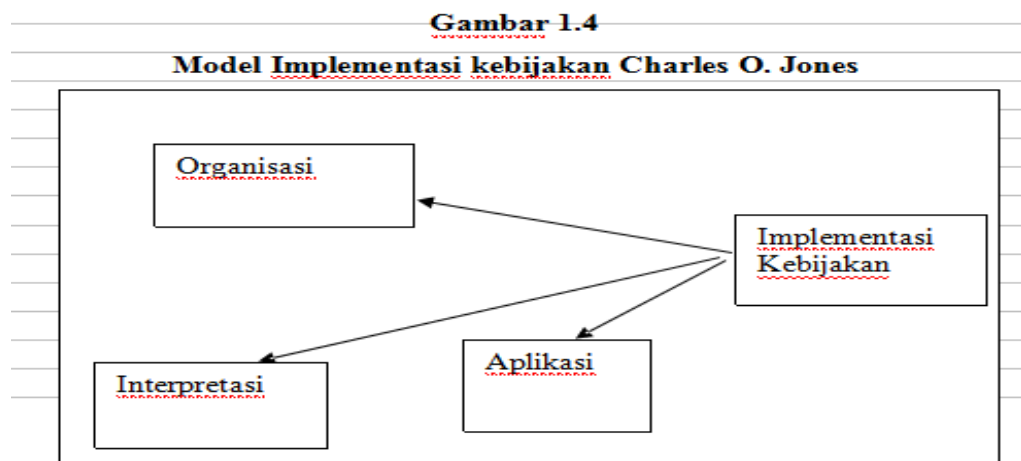
Tiga aktivitas yang dimaksud adalah :

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,

2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan

3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Berikut merupakan gambar model implementasi kebijakan menurut Charles O.Jones :



Sumber : Jones, 1996 : 166 dalam buku Arifin (2014:81)

Dari ketiga model implementasi kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh para ahli, nantinya akan dipilih teori yang paling relevan sesuai dengan penelitian peneliti yaitu Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Edward III dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan retribusi jasa umum dengan studi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang, hal ini dikarenakan teori Edward III merupakan teori yang berlandaskan pelaksanaan kebijakan Top-down saat pelaksanaannya sehingga sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1.7 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian dalam penelitian ini ada sebagai jawaban terhadap tujuan penelitian di dalam penulisan ini oleh penulis sebagai bentuk penyerpunaan sebuah kebijakan. Dalam hal ini terdapat dua substansi yang terkait yaitu mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi pasar di Kota Semarang serta apa saja faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemungutan retribusi pasar di Kota Semarang.

Berdasarkan konsep kebijakan publik, Implementasi Kebijakan Perda No.2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum terdapat hal-hal mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Pusat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah. Implementasi Kebijakan Perda No.2 Tahun 2012 Studi Retribusi Pelayanan Pasar ini mengacu pada lima prinsip Riant Nugroho (2011:650-652) yang bertujuan untuk

mengukur bagaimana kebijakan ketepatan implementasi kebijakan itu sendiri.

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan Kebijakan yang dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang yang telah diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di Kota Semarang. Retribusi pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang guna memecahkan masalah yang ada mengenai keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar, bagaimana kesesuaian isi kebijakan dengan tarif yang dipungut dan ketepatan isi kebijakan terhadap fakta di lapangan yaitu dalam pemberian jasa pelayanan.

Kesesuaian dan ketepatan isi kebijakan yang diatur dalam Perda Kota Semarang No.2 Tahun 2012 tentang Jasa Umum dengan studi retribusi pelayanan pasar dikaji lebih dalam pada pasal 40 ayat (2) dan (3), pasal 43 ayat (2), (3) dan (5) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) yaitu :

- Ketepatan penyediaan dan penggunaan fasilitas.
- Ketepatan jasa pelayanan pasar.
- Kesesuaian tarif pasar berdasarkan kebijakan.

2. Ketepatan pelaksanaan

Ketepatan Pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu peran pelaksana kebijakan yang tepat sesuai dengan tupoksinya.

- a. Ketepatan aktor pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 dengan Studi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang

dalam hal ini yaitu Dinas Perdagangan, UPTD Karangayu, Juru Pungut Pasar Karangayu serta masyarakat.

b. Pengaruh pelaksana lembaga-lembaga lain terhadap kebijakan.

3. Ketepatan Target

Ketepatan Target dalam penelitian ini yaitu:

a. Melihat ketepatan sasaran kebijakan Perda No.2 Tahun 2012 studi pelayanan pasar di Kota Semarang sudah sesuai dengan target atau tidak tumpang tindih.

b. Ketepatan sasaran target dalam kebijakan Perda No.2 Tahun 2012 dengan studi retribusi pelayanan pasar pasal 40 ayat (3) mengenai penataan dan penertiban dengan kondisi mendukung atau menolak.

4. Ketepatan Lingkungan

Hubungan atau interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses yang dilihat dari tiga tahapan yaitu :

a. Penerimaan Kebijakan. Di sini publik memahami kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

b. Adopsi Kebijakan. Di sini publik menerima kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi

lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

- c. Kesiapan Strategis. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar, di sisi lain birokrat *on the street* (atau birokrasi pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan. Seperti yang anda ketahui tanggung jawabnya untuk kebijakan.

Berhasil tidaknya implemementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pengimplementasi kebijakan ini. Peneliti menyimpulkan model implementasi kebijakan yang peneliti anggap lebih relevan dengan penelitian ini dalam kajian teori yaitu Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan Edward III yaitu :

1. Komunikasi

1. Konsistensi, Perintah dan arahan yang diterima pelaksana kebijakan haruslah konsisten tidak berubah-ubah sehingga membuat pelaksana kebijakan mengalami kebingungan dan tujuan awal tidak terlaksana.
2. Transmisi, informasi yang disalurkan kepada pelaksana kebijakan tidak diterima dengan cepat dan tepat sehingga pelaksanaan dari kebijakan dapat efektif.
3. Kejelasan, kejelasan perintah yang diterima harus jelas, akurat, tidak kurang dan ambigu

2. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia, SDM merupakan faktor penting dalam

keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Kualitas dan kuantitas SDM dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan public.

2. Fasilitas, fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kebijakan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Fasilitas seperti sarana dan prasana seperti fasilitas fisik ketersediaan peralatan kantor atau fasilitas non fisik seperti bentuk latihan kepada implementor dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan.
3. Wewenang, wewenang yang ada dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penggunaan wewenang secara efektif. Dimana pemimpin menggunakan wewenang formal sebagai mana mestinya dapat berupa persuasi, ancaman dan tawaran keuntungan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor kebijakan publik.

Karakteristik pelaksana kebijakan :

- a. Kejujuran pelaksana kebijakan.
- b. Komitmen pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

- a. Ketersediaan SOP (*standard operating procedure*)
- b. Kejelasan SOP (*standard operating procedure*)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lainpun dapat mengamatinya. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis.

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian mempunyai dua jenis yaitu penelitian kualitatif yang dalam penelitiannya lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif dan penelitian kuantitatif dalam penelitiannya lebih banyak menggunakan pendekatan statistik.

Metode penelitian terbagi menjadi dua jenis yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam permasalahan ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif.

1.8.1 Penelitian Kualitatif

Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi (2006: 4-5) penelitian digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Tipe Penelitian Eksploratif

Tipe penelitian eksploratif adalah tipe penelitian yang berusaha untuk menelusuri atau menggali ada tidaknya suatu masalah atau ingin mengetahui secara mendalam akan suatu masalah tertentu.

2. Tipe Penelitian Deskriptif

Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu, disini belum ada hipotesis, namun sudah ada analisis meskipun belum begitu mendalam seperti misalnya: analisis tabel, analisis presentase, analisis deduktif-induktif, dan sebagainya.

3. Tipe Penelitian Eksplanator

Tipe penelitian eksplanatori adalah tipe penelitian yang sudah ada hipotesisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar-kecilnya hubungan dan pengaruh dari suatu variabel ke variabel lainnya, dalam rangka untuk menguji penelitian yang akan diajukan guna diterima atau di tolak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mencoba menjelaskan sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pasar yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam pelaksanaannya.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Situs penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai Dinas yang mengelola dan melakukan pungutan retribusi di Kota Semarang.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan retribusi pasar di Kota Semarang dalam rangka peningkatan PAD dan lokus yang diambil adalah di Pasar Karangayu, Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian sebagaimana yang dikemukakan Spradley (1979) merupakan sumber informasi, sedangkan Moleong (1989) mengemukakan bahwa subyek penelitian merupakan orang dalam pada latar penelitian. Secara lebih tegas Moleong mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian .

Untuk menentukan atau memilih subyek penelitian yang baik, setidaknya-tidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
- b. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut.
- c. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.

Subyek yang menjadi penelitian penulis ini yaitu semua pihak yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi di Kota Semarang antara lain Dinas Perdagangan Kota Semarang ,Pedagang di Pasar Karangayu dan UPTD Pasar Karangayu,Kepala Pasar Karangayu Kota Semarang dan Pedagang Pasar Karangayu.

1.8.4 Jenis Data

Menurut Lofland dan Loftland dalam Moleong (2010:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (1989: 122), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Di dalam hal ini, peneliti sebagai pengumpul data primer yang menggunakan panduan wawancara. Data primer tersebut didapatkan dari hasil wawancara terhadap informan, yakni pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang yang berkaitan dengan bidang pelayanan pasar Kota Semarang, Masyarakat atau pedagang yang menggunakan pelayanan pasar Semarang, Kepala Pasar Karangayu yang mengelola pasar dan Kepala Seksi Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang Pasar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari dokumen, buku, data statistik, laporan, jurnal, arsip, dan data yang dipublikasikan terkait dengan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009: 137) menjelaskan pengumpulan data dapat dilakukan dalam

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada labolaturium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai infroman pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

Untuk mendapatkan data-data di objek penelitian, teknik yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2009: 145) observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua duantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-hgejala alam dan bila informan yang diamati tidak terlalu besar.

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Pasar Karangayu Kota Semarang. kemudian yang menjadi analisis pengamatan adalah sejauh mana proses implementasi kebijakan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam rangka peningkatan PAD di Kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit/kecil.

Di dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang yang berkaitan dengan bidang pelayanan Pasar Kota Semarang, Masyarakat atau pedagang yang menggunakan pelayanan pasar Kota Semarang untuk melakukan kegiatan ekonomi, Kepala Pasar Karangayu Kota Semarang yang bertugas mengelola pasar. Dengan wawancara tersebut diharapkan dapat menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dengan berbicara terbuka dan apa saja yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam garis besar tetap terstruktur. Peneliti menggunakan *interview guide* yang menjaga wawancara agar tetap dalam garis besar terstruktur. Dengan demikian penulis sebagai instrumen penelitian dituntut untuk membuat para informan lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan informasi atau data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2009: 240) mendefinisikan dokumentasi merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2010:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Analisis data tersebut memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan peneliti yaitu :

1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan pemusutan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan, yaitu dengan cara menilai pokok-pokok yang sesuai dengan fokus penelitian terkait masalah implementasi kebijakan retribusi pasar di Kota Semarang. Data-data yang direduksi ini memberikan gambaran yang tajam dan mempermudah penelitian jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Kumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman

(1984) menyatakan :

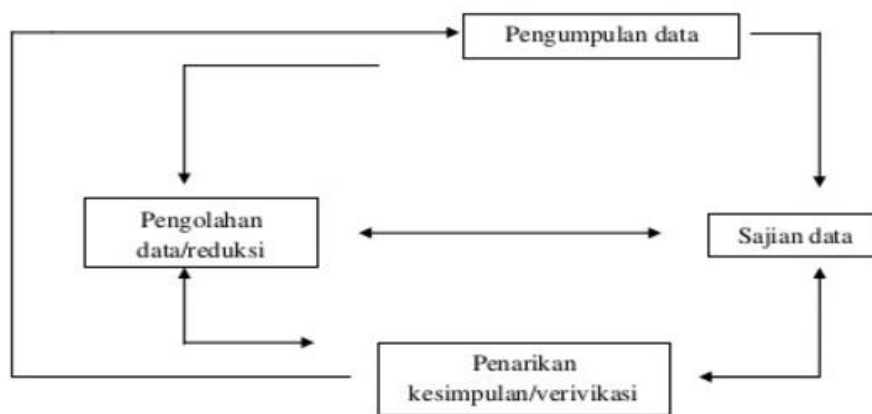
"the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text" dalam Sugiono (2012:249). Adapun dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk pengujian yang bersifat deskriptif.

3. *Conclusive Drawing/Verification*

Berdasarkan data-data yang diperoleh, peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari kesimpulan yang kabur menjadi jelas, karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan mengenai data tersebut.

Gambar 1.5

Proses Analisis Data



Skema 3.2 Proses analisis dalam model interkatif (Miles dan Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2008).

Pengumpulan data dari penelitian implementasi kebijakan retribusi pasar di Kota Semarang secara kualitatif dengan tipe deskriptif dilakukan dari tahapan sebelum

peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis ini di mulai sejak suatu masalah dirumuskan dan diidentifikasi. Sebelum terjun ke lapangan atau prasurey sampai dilakukan penulisan hasil penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*) menurut versi ‘positivisme’ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2011: 321).

Teknik untuk menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan teknik ini peneliti membandingkan data pengamatan yang diperoleh untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara terstruktur. Selain itu peneliti juga menggunakan informan lebih dari satu untuk menguji kebenaran informasi atau data yang diberikan.